

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Pembangunan Hukum: Sebuah Orientasi dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. V*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992,
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Agus Suradika dan Virgana, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Mandiri, Tangerang, 2012.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Hakim Nasoetion, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Litera AntarNusa, Jakarta, 1999.
- Andris, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Konsep dan Implementasi*, Penerbit K-Media, Bandung, 2025.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 1995.
- AR. Surjono dan Bony Daniel, *Komentar Hukum Pidana*, Refeika Adaitama, Bandung, 2009.
- Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005.
- Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2006.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003.
- B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- _____, *Dalam Ethika Hukum*, Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2008.

- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2008.
- De Vos, *Pengantar Etika*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002.
- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), Jakarta, 2001.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Goesniadhie, K. S., *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JP-Books, Surabaya, 2006.
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 1973.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia :Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight, Berkeley, University of California Press, 1967.
- Heather Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, Wash. UJL & Pol'y 2, 2000.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajawali Press, Depok, 2017.

- James O Gill & Moira Chatton, *Memahami Laporan Keuangan*, PPM, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori HansKelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2012.
- Jumanta Hamdayana, Heri Herdiawanto dan Fokky Fuad, *Pancasila Suatu Analisis Yuridis, Historis dan Filosofis*, Hartomo Media Pustaka, Jakarta, 2012.
- J.Satrio, *Surat Keterangan Waris*, IPPAT, Mojokerto, 2004.
- Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum*, Penerbit : Universitas Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- K. Kholilurrahman, *Membangun Penegakan Hukum yang Beradab*, Tinta Mas, Jakarta, 2013.
- Lawrence W.Friedman, *American Law : An Introduction*, W.W.Norton and Co, New York, 1984.
- Lawrence M. Fiedman, *American Law*, Teijemahan : Wishnu Basuki, Penerbit : Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Liek Wilardjo, *Realita dan Desederata*, Duta Wacana University, Yogyakarta, 1990.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Louis Edward Levinthal, "The Early History Of Bankruptcy Law", *University of Pennsylvavina Law Review and American Law Register*, Vol. 66-No, 5/6 Apr, 1918.
- Marpaung, L, *Perumusan Memori Kasasi & Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000.
- _____, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- _____, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, 1986.
- _____, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, 1986.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Palajar, Yogyakarta, 2010.

- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik & Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Mulhadi, *Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia*, FH Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- _____, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- _____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed.2, cet. 13 Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, Eresco, Bandung, 1993.
- M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2019.
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum*. C et. V, Revika Aditama, Bandung, 2009.
- Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cetakan pertama, Menuju Insan Cemerlang, Surabaya, 2015.
- Paul Scholten, *De Structure der Rechtswetenschap*, Terjemahan Sidharta B. Arief : Struktur Ilmu Hukum, Penerbit PT Alkimi, Bandung, 2003.
- Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993,
- Samryn, L. M., *Pengantar Akuntansi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sutiyoso, B., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

- Tan, Thong Kie. *Studi Notaris Serba-serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru van Haeve*, Jakarta, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cita Intrans Selaras, Malang, 2017.
- Thalib, A. R. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Tom Campbell, *Prescriptive Legal Positivism*, Penerbit : UCL PRESS, London, 2004.
- Philipus M. Hadjon, “*Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” dalam Bagir Manan (Ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Cetakan ke-1, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahardjo, S., *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, sebagaimana terdapat dalam menggagas hukum progresif Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, A., *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Ronald Dworkin, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence* dalam Patrick Nerhot, *Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, Netherland, 1990.
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism, Bentuk, Dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Salman, O., & Susanto, A. F., *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan & Membuka Kembali*. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006.
- Soedeson Tandra, *Hukum Kepailitan, Kertas Kerja Kurator & Pengurus*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit – UI, Jakarta, 1975.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 1988
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sukarman Purba, dkk., *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020.
- Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat*, Malang, Setara Press. 2017.
- Prasetyo, R., *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejaksaan Agung*, BPHN, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Widyawati Boediningsih, *Hukum Administrasi Negara*, Narotama University Press, Surabaya, 2013.
- Wignjosoebroto, S., *Hukum, Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*. Cet. 1., ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002.
- William Livesey Burdick, *The Principles of Roman Law and Their Relation to Modern Law*, The Lawbook Exchange, Ltd., New Jersey, Amerika Serikat, 2004.
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglemen voor de Buitengesten (RBg)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Sumber Lain

Abd. Rahman dan Heriyanto, “Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, *HUKMY Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, April 2021.

Abildanwa, T. “Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016, Vol.3(1), 138–148.

Almunawar Sembirng dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 3, March 2023.

Anissa Nabilla dan Irwan Triadi, “Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum”, *Media Hukum Indonesia*, 2025, Vol. 3, No. 4.

Arfan Faiz Muhlizi, “Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI /2013 *Extraordinary Request To Judicial Review In Criminal Cases Aimed To Justice And Legal Certainty An Analysis Of Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 9 Januari 2015.

Auliya Putri Dewi dkk, “Pancasila: Filosofi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara* Volume. 1 No. 3 Juli 2024.

Bassar, S, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung, 1986.

Chakim, M. L.. Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 328–352, 2015.

- Chairul Huda, Makalah: Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) di BPHN Jakarta, 21 Oktober 2010.
- Dera Reswara Santiaji, "Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik," *Aktualitas* 3, no. 1 (2019): 365–81, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/5804>.
- Desi Napouling, "Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017)", *Indonesian Notary*, Volume 4 Nomor 2, 2022.
- Dwika, "Keadilan dan Sistem Hukum", <http://huku.kompasiana.com>, dikutip dalam Maraja Malela Marpaung, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 4 Nomor 2, 2019.
- Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 1, March 2020.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Hizbul Maulana, *Masyarakat Indonesia Membutuhkan Notaris*, Primamedia, Jakarta, 2015.
- I Nyoman Ganang Bayu Weda dan Made Gde Subha Karma Resen, "Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris Di Indonesia", *Acta Comitatus Jurnal Kenotariatan Indonesia*, Vol. 7 No. 01 April 2022.
- John Braithwaite, "Rules and Principle : A Theory of Legal Certainty", *Australasian Journal of Legal Philosophy*, Volume 27, January, 2002.
- Lalamentik, E. E., "Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex Administratum*, 2019, Volume 6 Nomor 3.
- Lolita Salsabila dkk, "Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris Terhadap Akta-Akta yang Telah Dibuatnya ", *UNES Law Review*, Volume 7 Nomor 1, September 2024.
- Malik Wahyu Kurniawan, "Prinsip Kepastian Hukum Jatuh Pailit Terhadap Notaris", *Jurnal Rechtens*, Volume 10 Nomor 2, Desember 2021.
- Meilina Rosa, "Penyimpanan Protokol Notaris Dengan Konsep Elektronik Dengan Cyber Notary", *Recital Review*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024.
- Muhammad Junaidi, "Semangat Pembaharuan dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Pesrpektif Sociological Jurisprudence", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III Nomor 1, Januari-April, 2016

- M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 1, 2019.
- Nilna Muna Yuliandar dan Yu Un Oppusunggu, "Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021.
- Ninie Suparni, "Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan", Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Pratiwi A., (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, h. 96, DOI: 10.28946/rpt.v9i2.637
- Rachmad Abduh and Ida Hanifah, "Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System", *Randwick International of Social Science (RISS) Journal*, Volume 1 Number 2, July 2020.
- Randi Eka Putra dan Winda Trisnawati, "Peranan Filsafat Ilmu Untuk Kemajuan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Di-Era Revolusi Industri 5.0", *Jurnal Tunas Pendidikan*, Volume 5 Nomor 1, 2022, <https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/pgsd/article/view/988>
- Reynaldi Yuliansyah Nasution dan Tetti Somasir, "Pembatalan SK Pemberhentian Tidak Hormat Notaris oleh Pengadilan Akibat Kesalahan Kementerian Hukum dan HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 294 K/TUN/2021)", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, January 2025. Vol. 2, No. 5.
- Ria Anggara, "Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara elektronik Di Korea Selatan Dan Di Indonesia", *Indonesian Notary*, Volume 3 Artikel 13, 2021
- Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ensiklopediaku – Ensiklopedia Social Review*, Volume 1 Nomor 2 Juni 2019.
- Rizqa Nurafrida Santi dan Rachmadi Usman, "Kedudukan Notaris yang Dinyatakan Pailit terhadap Jabatannya", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025.
- Sanjaya, R. (2016). "Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. 5(4). h. 2. DOI : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1973.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy* 27, no. 3, 2010.

Sumber Elektronik

Aries, A. (2015). Menguji efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ae37fc15e14/menguji-efektivitas-semanomor-7-tahun-2014-broleh--albert-aries-sh--mh->.

Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja”, <http://badilum.info/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teoris_hukum_pembangunan.pdf> [03/06.2015].

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Saputra, A. “Putusan MK jadi biang kerok gembong narkoba tak kunjung didor”. 2015, Diakses dari <http://news.detik.com/read/2015/01/01/140700/2791858/10>

Wijaya, A.L., *Penggelapan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris* (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 29/PID.B/2020/PN Pwk) KemenkumHAM Sulbar : <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3621-pelaku-pencucian-uang-memanfaatkan-akta-notaris-sebagai-legal-standing>

<https://www.arina.id/edukasi/ar-4elch/upaya-hukum-peninjauan-kembali--sejarah-dan-pengertian--alasan-pk--dan-bagaimana-cara-pengajuan->

<https://repository.umj.ac.id/19885/1/Makalah%20Filsafat%20Rizki%20Winda%20200210100079.pdf>

[https://www.ibanista.com/frais-de-notaire-understanding-the-notary-fees-in-france/#:~:text=price%2C%20excluding%20VAT.-,Notary%20fees%20\(%C3%A9moluments%20du%20notaire\),17%2C000%20%E2%82%AC%20and%2060%2C000%20%E2%82%AC](https://www.ibanista.com/frais-de-notaire-understanding-the-notary-fees-in-france/#:~:text=price%2C%20excluding%20VAT.-,Notary%20fees%20(%C3%A9moluments%20du%20notaire),17%2C000%20%E2%82%AC%20and%2060%2C000%20%E2%82%AC)

<https://www.csn.notaires.fr/en/superior-council-notariescsn#:~:text=The%20tasks,serve%20notaries%20and%20the%20public>

<http://www.koreanotary.or.kr/wp-content/uploads/2014/10/KNA-presentation.pdf?PHPSESSID=31801633879958cf5fbd8c1588ef5ff5#:~:text=Page%205,to%20establish%20a%20joint%20office.>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis#:~:text=Apa%20itu%20Landasan%20Filosofis?,Pancasila%20dan%20Pembukaan%20UUD%201945.>

[https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=46308&type=part&key=7#:~:text=No%20appointed%20notary%20public%20shall,\(5\)](https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=46308&type=part&key=7#:~:text=No%20appointed%20notary%20public%20shall,(5))

Zaidan, M. A., 2015, Januari 7, “PK untuk keadilan”. *Opini Kompas*